

ABSTRAK

Adi Rizka Permana: “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penegak Hukum Di Wilayah Kabupaten Majalengka Dihubungkan Dengan Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT”.

Perlindungan hukum pada perempuan dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut dibuat dalam rangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dibuatnya beberapa peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, namun dalam prakteknya belum dapat menjamin perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak kekerasan fisik, psikis dan seksual. Instrumen hukum belum mampu menjadi dasar untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kendala penegakan hukum dalam mengimplementasikan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, apakah upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu meneliti dan memberi gambaran yang menyeluruh dan sistematis terkait perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk kemudian dianalisis. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi dengan melihat kenyataan yang ada di masyarakat terkait perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh aparat penegak hukum.

Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum dalam mengimplementasikan perlindungan korban terhadap perempuan yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Majalengka sulit mengungkap dan menyelidiki adanya kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap perempuan. Padahal prinsip perlindungan hukum itu sendiri adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA Polres Majalengka terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah melakukan pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan melakukan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga serta pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dan represif.

ABSTRACT

Adi Rizka Permana: “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penegak Hukum Di Wilayah Kabupaten Majalengka Dihubungkan Dengan Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT”.

The legal protection for women from acts of violence, especially violence has been regulated in various national legal instruments. Law Number 23 of 2004 concerning about Domestic Violence was made in the context of eliminating discrimination against women. There were made several regulations as legal instruments to protect women from violence, but in practice can not guarantee the legal protection of women from physical violence, psychological and sexual. The legal instruments have not been able to become the basis for guaranteeing legal protection for women victims of domestic violence.

This study aims to determine whether the obstacles to law enforcement in implementing the protection of victims of violence against women in the household, whether legal protection efforts against women as victims of domestic violence.

This type of research is analytical descriptive, namely researching and providing a comprehensive and systematic description of the legal protection for women victims of domestic violence for later analysis. This research was conducted through an empirical juridical approach, empirical juridical research is legal research regarding the enforcement or implementation by looking at the reality in society regarding legal protection for women victims of domestic violence by law enforcement officers.

The results showed that the implementation of law enforcement in implementing victim protection for women carried out by the PPA Unit of the Majalengka Police is difficult to uncover and investigate the existence of domestic violence. Legal protection for women victims of domestic violence has not fully provided protection for women. Whereas the principle of legal protection itself is to provide protection for human rights that are harmed by others and that protection is given to the community so that they can enjoy all the rights granted by law. The legal protection provided by the PPA Unit of the Majalengka Police for women victims of domestic violence is to prevent the occurrence of domestic violence and provide assistance to victims of domestic violence as well as preventive and repressive recovery for victims of domestic violence.